

PENGARUH DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN BOGOR

Arunia Trie Wulansari^{1*} , Rafrini Amyulianthy² , Herlan³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia

*E-mail: aruniiwulansari6@gmail.com

Diterima 26 Februari 2024, Disetujui 15 Maret 2024

Abstrak

Riset ini memiliki capaian dalam rangka mengetes peran dana desa dan alokasi dana desa dalam level kemiskinan di kabupaten Bogor pada tahun 2022. Riset ini menerapkan prosedur cara berdasarkan pengolahan data serta tipe data yang dipakai yakni data pelengkap yang diperoleh melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten Bogor. Hasil yang terhimpun kemudian dikaji menerapkan tes asumsi klasik serta kajian regresi linier berganda terhadap dana desa dan alokasi dana desa sebagai variabel independen dan tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen. Hasil riset ini menyatakan yakni berdasarkan simultan (Uji F) dana desa dan alokasi dana desa memiliki peran yang baik dalam level kemiskinan Kabupaten Bogor, berdasarkan parsial (Uji t) dana desa dan alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten Bogor. Pandangan ekonomi ini belum terlaksana sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan dibuat karna kepentingan dan prevesnsi individu saling bertentangan. Ini sesuai dengan teori yang digunakan yaitu *Public Choice Theory*.

Kata Kunci: Dana desa, Alokasi Dana Desa dan Tingkat Kemiskinan

Abstract

This research has achievements in order to test the role of village funds and village fund allocation in poverty levels in Bogor district in 2022. This research applies procedures based on data processing and the type of data used, namely complementary data obtained through the Community and Village Empowerment Service (DPMD) Bogor district. The results collected were then studied applying classical assumption tests as well as multiple linear regression studies on village funds and village fund allocation as independent variables and poverty level as the dependent variable. The results of this research indicate that based on simultaneous (F test) village funds and village fund allocations have a good role in the poverty level of Bogor Regency, based on partial (t test) village funds and village fund allocations have a significant effect on the poverty level of Bogor Regency. This economic view has not been implemented in accordance with the regulations established and created because individual interests and preferences conflict with each other. This is in accordance with the theory used, namely Public Choice Theory.

Keyword: Village Fund, Village Fund Allocation and Poverty Rate

PENDAHULUAN

Satu diantara beberapa fokus pemerintahan yakni memberantas kemiskinan diwilayah desa. Hal tersebut dikarenakan hingga kini, level kemiskinan diwilayah desa cenderung diatas daripada diwilayah kota (Badan pusat statistik, 2019). Pemerintah Indonesia berusaha mengatasi masalah kemiskinan yang merujuk pada regulasi hukum asas 1945 serta pancasila, dengan bunyi keadilan sosial untuk semua warga negara Indonesia.

Dalam mengatasi kemiskinan negara pula memiliki hubungan pada pimpinan wilayah untuk melaksanakan pengontrolan maupun pemantauan terhadap pemakaian biaya yang diwujudkan (Sigit, Kosasih, 2020). Melalui capaian yang tidak berbeda, pimpinan wilayah maupun pusat diharapkan dapat mendorong pembangunan di wilayah kepulauan. Diharapkan bahwa kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat dapat ditangani melalui terdapatnya keuangan desa serta didistribusikan oleh desa-desa. Pemerintah percaya bahwa supaya mempertegas bangunan ekonomi indonesia, mengakselerasikan akan pemberantasan kemiskinan, maupun meminimalisir kesenjangan antar wilayah, pembangunan perdesaan sangat penting.

Desa bertanggung jawab untuk membangun perubahan sosial secara strategis. Desa merupakan unit penduduk hukum dengan batas daerah dengan memiliki otoritas dalam rangka membimbing maupun Menyusun masalah ketatanegaraan dan keutamaan penduduk sekitar merujuk pada prakarsa warga sekitar, sumber maupun hak pada umumnya yang diyakini serta diikuti terkait pola pimpinan NKRI (Peraturan Bupati 2022).

Undang-Undang Desa menuliskan regulasi terkait pendanaan wilayah maupun infrastruktur desa, khususnya Pasal tujuh puluh dua ayat satu variabel b menegaskan yakni pemerolehan desa berpusat pada APBN. Supaya menyediakan alur terkait pemerolehan desa, negara membuat regulasi negara Nomor enampuluh per 2014, mengenai perolehan wilayah dalam hal ini yakni Dana Desa.

Dana desa (DD) adalah kemudahan stimulan maupun biaya stimulasi dalam rangka penegasan untuk mendanai kebijakan Pemerintah Desa, seperti pengimplementasian pembangunan, program untuk penduduk, maupun penyejahteraan warga sekitar (Peraturan Bupati Bogor tahun 2022). Pagu alokasi asas seperti yang termaktub pada Pasal empat variabel a dijumlahkan sebanyak 65% terhadap pembiayaan wilayah diklasifikasikan dengan merata terhadap Desa maju, mandiri, tertinggal maupun berkembang berdasarkan klaster jumlah penduduk.

Menurut Data Sistem Informasi Desa pada tahun 2021 pagu anggaran keuangan wilayah dengan total Rp. 72 Triliun dengan pembagian terhadap 74.961 desa. Dari jumlah anggaran jika dibagi dengan jumlah desa, maka seluruh desa nantinya mendapatkan Rp. 1 Miliar. pengimplementasian pembangunan maupun pemerataan sejahteranya penduduk desa nantinya tidak berhasil apabila kepengurusan tidak direvisi seperti perancangan, pengimplementasian, pengontrolan, maupun pencatatan.

Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima daerah melalui dana pemerolehan

pengurangan wilayah sesudah diminimalisir keuangan alokasi tertentu. Tahap terhadap perimbangan pendanaan negaea maupun wilayah yang didapatkan kabupaten/kota dalam daerah sekurang-kurangnya 10%.

Untuk tahun anggaran 2022, Alokasi dana desa (ADD) dialokasikan sebesar 365.385.081.248. Dibandingkan dengan kabupaten lain di Indonesia, Kabupaten Bogor menerima dana paling banyak. Menurut regulasi kementerian terhadap Negeri Nomor tiga puluh tujuh per 2007, pengentasan kemiskinan adalah tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD). Meskipun demikian, kemiskinan terus menjadi tantangan untuk ditangani meskipun ada banyak Dana Desa. Garis kemiskinan didasarkan pada pendapatan.

Berdasarkan badan pusat Statistik Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa secara umum jumlah tingkat kemiskinan yang terjadi di kabupaten Bogor berada pada total warga negara miskin sejumlah 474.740 jiwa per 2022 (BPS dalam angka, 2023) paling banyak ada pada Jawa Barat.

Menurut badan pusat statistik terkait kemiskinan memperlihatkan indeks rupiah perbelanjaan paling sedikit yang dibutuhkan individu dalam rangka melengkapi keperluan sehari- harinya, bseperti keperluan konsumsi ataupun sebaliknya. Akan tetapi, penilaian ini malah tidak mendeskripsikan batas kemiskinan sesungguhnya. Hal ini karena tidak sedikit individu yang bukan terklasifikasi miskin berdasarkan unsur pemerolehan namun digolongkan sebagai orang miskin yang berdasarkan pada syarat-syarat tujuan pembangunan manusia.

Kabupaten Bogor merupakan kabupaten yang mempunyai luas \pm 2.664 kilo meter Batas- batas daerah Kabupaten bogor yakni bagian Utara, yang memiliki batas terhadap Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi; bagian Barat, memiliki batas terhadap Kabupaten Lebak; bagian Timur, memiliki batas terhadap Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur serta Kabupaten Purwakarta; bagian Selatan, memiliki batas terhadap Kabupaten Sukabumi maupun Kabupaten Cianjur; Adapun wilayah Tengah memiliki batas terhadap Kota Bogor. Sedangkan persentase penduduk miskin dikabupaten Bogor 2022 sebagai berikut:



Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bogor Tahun 2015-2022

KAJIAN TEORI

Public Choice Theory merupakan konsep ekonomi yang berpusat dalam menentukan ketetapan publik maupun terkait program publik dirancang melalui keadaan keperluan maupun penyusunan seseorang yang memiliki kaitan (Nurkhamid, 2023). *Public Choice Theory* berasumsi bahwa setiap keputusan yang diambil secara kolektif maka termaktub didalamnya motif-motif individu. Karena itu, orang percaya bahwa kepentingan pribadi selalu mengendalikan tindakan dan perilaku birokrat, politisi, wakil rakyat, dan pihak berkepentingan lainnya.

Kemiskinan adalah individu dengan memiliki pendapatan perkapita total keseluruhan per periode dalam keadaan kemiskinan, dalam unit jiwa (Fitri & Anwar, 2020). Dimana secara umum ukuran kemiskinan dibagi menjadi 2 golongan yakni Kemiskinan relatif maupun absolut.

Dana desa merupakan keuangan yang berpusat melalui ekonomi pemerolehan maupun pengeluaran wilayah Kabupaten/Kota serta dipakai dalam rangka mendanai peyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan kemasyarakatan, pembangunan, pembinaan, maupun kesejahteraan penduduk (Peraturan Pemerintah 2014). Alokasi dana desa adalah dana perimbangan yang diperoleh wilayah sesudah pengurangan keuangan alokasi tertentu (Peraturan Bupati, 2022).

METODE

Merujuk pada capaian riset yang sudah ditentukan, jadi tipe riset yang nantinya diimplementasikan yakni riset berdasarkan pengolahan data angka. Variabel yang digunakan terdiri dari keuangan desa, alokasi keuangan wilayah dan level kemiskinan. Sampel dalam riset ini adalah 39 kecamatan di Kabupaten Bogor Tahun 2022. Metode pengumpulan hasil penelitian menggunakan dokumentasi serta kajian literatur. Obyek penelitian yang digunakan adalah mengenai keuangan wilayah maupun Alokasi keuangan Desa dalam level kemiskinan dalam Kabupaten Bogor 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Deskriptif

Berdasarkan hasil penelitian dari 39 data laporan keuangan keuangan desa, alokasi keuangan wilayah, tingkat kemiskinan yang berada pada Kabupaten Bogor tahun 2022. Tingkat kemiskinan memiliki skor total keseluruhan berdasarkan penjumlahan sebesar 65.626,87 dengan standar deviasiasinya yaitu sebesar 20.014,926. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat penyimpangan yang terjadi pada variabel dependent yaitu tingkat kemiskinan lebih kecil dari nilai rata-ratanya. Nilai maksimum pada Tahun 2022 sebesar 112.824 oleh Kecamatan Pamijahan dan nilai minimum sebesar 29.648 oleh Kecamatan Cariu.

Variabel Dana Desa (x_1) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 18.879,23 dengan standar deviasinya 25.635,817 nilai tersebut menunjukkan bahwa level keberadaannya cenderung tinggi dibandingkan skor total keseluruhan berdasarkan penjumlahannya. Nilai maksimum sebesar

138.312 dimiliki oleh Kecamatan Citeureup dan nilai minimum sebesar 7.260 dimiliki oleh Kecamatan Kemang. Variabel Alokasi Dana Desa (x2) mempunyai skor total keseluruhan berdasarkan penjumlahannya sebanyak 9.181,36 dengan standar deviasinya 2.347.975 nilai tersebut menunjukkan bahwa level keberadaannya cenderung rendah dibandingkan skor total keseluruhan berdasarkan penjumlahannya. Nilai maksimum sebesar 15.206 dimiliki oleh Kecamatan Gunung Putri dan nilai minimum sebesar 5.234 dimiliki oleh Kecamatan Tenjolaya.

2. Uji Normalitas

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		39
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	12206,720
Most Extreme Differences	Absolute	,089
	Positive	,089
	Negative	-,088
Test Statistic		,089
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200

Sumber: data olah SPSS 26 (2023)

Berdasarkan hasil penelitian, angka probabilitas atau Asymp. signifikan (2-tailed) dengan total 0,200 cenderung di atas dibandingkan 0,05 yang menunjukkan yakni hasil melalui riset ini data terdistribusi berjalum seperti biasanya. Menjadikan bisa diterapkan dalam rangka tahap pengujian selanjutnya.

3. Uji Multikolinearitas

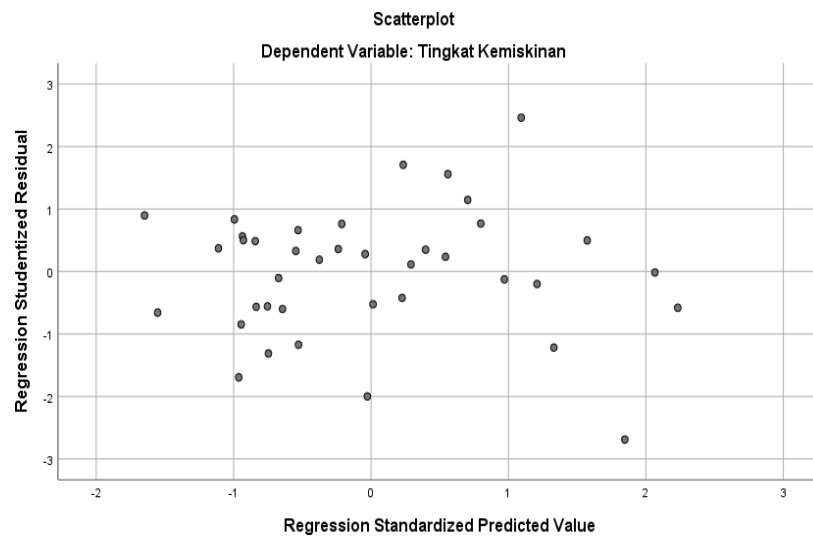
Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
Dana Desa	0,997	1,003
Alokasi Dana Desa	0,997	1,003

Sumber: data olah SPSS 26 (2023)

Berdasarkan hasil pengolahan data uji multikolinieritas menunjukkan bahwa *variance Inflation Factor* (VIF) data tidak terikat yakni kualitas keuangan wilayah, Alokasi keuangan wilayah cenderung di bawah dibandingkan sepuluh maupun skor toleransi cenderung di atas dibandingkan nol komah sepuluh. Artinya tidak terdapat multikolinearitas terhadap riset ini. Artinya bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya.

4. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Hasil Uji Heterskedastisitas Sumber: data olah SPSS 26 (2023)

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa garis-garis dalam grafik *scatterplot* tersebut menyebar baik diatas angka maupun tidak di atas skor nol sumbu Y atau vertikal. Hal ini menunjukkan tidak terjadinya heterokedasitas, sehingga bisa dinyatakan yakni data dependen menunjukkan tingkat yang sama dari variabel independen. Sehingga dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya

5. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Konstanta	5016,953	8272,147		0,606	,548
Dana Desa (x1)	0,231	0,079	0,296	2,907	,006
Alokasi Dana Desa (x2)	6,126	,868	,719	7,059	,000

Sumber: data olah SPSS 26 (2023)

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut

- 1) Skor konstanta sebanyak 5.016,953. Nilai tersebut dapat diartikan apabila data yang tidak terikat yakni keuangan wilayah, alokasi dana desa tidak ada atau tidak berbeda pada 0, jadi nilai tingkat kemiskinan sebesar 5.016,953.
- 2) Nilai Dana Desa (x1) sebesar 0,231. Nilai tersebut dapat diartikan jika dana desa menambah unit, jadi nilai tingkat kemiskinan dengan total 0,231 melalui tanggapan data yang lain tidak berubah atau konstan.
- 3) Nilai Alokasi Dana Desa (x2) sebesar 6,126. Nilai tersebut dapat diartikan jika alokasi dana desa meningkat dalam unit, jadi skor tingkat kemiskinan meningkat sebesar 6,126 melalui tanggapan data yang lain tidak berubah atau konstan

6. Uji t

Tabel 4. Hasil Uji t

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Kesimpulan
	B	Std. Error	Beta			
Konstanta	5016,953	8272,147		0,606	0,548	-
Dana Desa (X1)	0,231	0,079	0,296	2,907	0,006	H1: Diterima
Alokasi Dana Desa (X2)	6,126	0,868	0,719	7,059	0,000	H2: Diterima

Sumber: data olah SPSS 26 (2023)

Merujuk pada data riset di atas bisa disimpulkan:

1) Pengaruh Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan

Data tes melalui tabel 4 menunjukkan nilai t_{hitung} untuk dana desa 2,907 dan nilai t_{tabel} 2,026 dengan nilai signifikan sebesar 0,006. Hal itu menunjukkan bahwa tingkat signifikan dana desa cenderung tidak besar dibandingkan 0,05, serta skor $t_{hitung} > t_{tabel}$. Menjadikan bisa dinyatakan yakni keunagan wilayah memiliki peran yang baik kepada tingkat kemiskinan.

2) Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil pengujian pada tabel 4 menunjukkan nilai t_{hitung} untuk alokasi dana desa 7,059 dan nilai t_{tabel} 2,026 melalui skor Sig. Dengan total 0,000. Artinya menunjukkan bahwa tingkat signifikansi lebih kecil 0,05, maupun skor $t_{hitung} > t_{tabel}$. Menjadikan bisa dinyatakan yakni alokasi keuangan wilayah yakni berperan dalam level kemiskinan.

7. Uji F

Tabel 5. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	9560543736,119	2	4780271868,059	30,393	,000
Residual	5662152538,240	36	157282014,951		
Total	15222696274,36	38			

Sumber: data olah SPSS 26 (2023)

Berdasarkan data riset skor F hitung yaitu menunjukkan nilai 30,393 dan nilai F_{tabel} 1,733, dengan nilai signifikansi 0,000 tidak besar dibandingkan 0,05 dan $F_{hitung} > F_{tabel}$. Jadi bisa dinyatakan keuangan wilayah, alokasi keunagan wilayah mempunyai peran pada level kemiskinan. Jadi diismpulkan data-data independen mempunyai tingkat keyakinan 95% bisa menguraikan tingginya data dependen yakni data kemiskinan.

8. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,792a	0,628	0,607	12541,213

Sumber: data olah SPSS 26 (2023)

Berdasarkan data tes koefisien determinasi menunjukkan bahwa indeks *Adjusted R-squared* sebesar 0,607. Sehingga bisa dinyatakan yakni data independen adalah keuangan wilayah,

alokasi keuangan wilayah dapat menjelaskan data bukan independen yakni tingkat kemiskinan 61% sedangkan 39% sisanya diuraikan dari unsur lain eksternal data riset ini.

Pembahasan

1. Pengaruh Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bogor Tahun 2022

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana desa bisa memiliki peran dalam level kemiskinan pada Kabupaten Bogor pada tahun 2022. Tingkat kemiskinan meningkat seiring dengan peningkatan keuangan wilayah, salah satu akibatnya adalah pembagian dana yang tidak adil antarkabupaten, kota, dan wilayah. Selain itu, formula tersebut tidak masuk akal jika dilihat dari kenyataan bahwa desa membutuhkan dana supaya menimalisir kemiskinan maupun menambah cara kepada penduduk miskin dalam menyakini adanya kepedulian negara.

Cara tersebut menghadirkan perwujudan regulasi wilayah memiliki peluang tidak sukses jika berkontribusi terhadap revisi jasa asas serta membasmi kemiskinan. Hal ini berkaitan dengan teori teori pemilihan publik dimana para anggota legislator politik dianggap memiliki keahlian dalam pikiran yang memiliki peluang dalam memprioritaskan dirinya sendiri seseorang disebut masuk akal serta menentukan pilihan paling tepat yang ada supaya mengoptimalkan kepuasannya.

Kegagalan pemerintah untuk memantau penggunaan dana desa dapat mengakibatkan konsekuensi tambahan. Penggunaan dana masyarakat desa tidak tepat sasaran karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor tambahan juga ada, seperti ketidakjelasan dan ketidakefektifan dalam manajemen dan pengalokasian Dana Desa. Jika dana tersebut tidak dialokasikan dengan tepat ke program yang benar-benar mengurangi kemiskinan, keuntungan yang diperoleh dapat terhambat.

Tingkat kemiskinan mungkin tidak berkurang sebagaimana yang diharapkan jika program tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan pada kesejahteraan masyarakat. Sangat penting untuk menerapkan sistem pengontrolan yang kokoh, mencakup masyarakat secara aktif, dan memastikan bahwa Dana Desa digunakan secara efisien untuk memerangi akar masalah kemiskinan di tingkat lokal.

Evaluasi tambahan dapat bermanfaat jika Dana Desa berhasil atau tidak mencapai tujuannya. Oleh karena itu, pimpinan wilayah wajib mengidentifikasi, mendekatkan, serta mewujudkan peluang ekonomi wilayah berdasarkan pada sumber daya yang ada. Kemudian, musyawarah desa harus dilakukan untuk menentukan usaha produktif mana yang akan diutamakan dalam mendanai dengan dana desa, sehingga masyarakat desa dapat merasakan manfaat dari dana desa dan tujuan program untuk mengurangi angka kemiskinan dapat dicapai.

2. Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bogor 2022

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bogor tahun 2022; lebih banyak alokasi dana desa, lebih tinggi tingkat

kemiskinan. Ini disebabkan oleh ketidakmerataan distribusi dana. Jika alokasi dana desa tidak didistribusikan secara merata atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang paling rentan, dampak positifnya terhadap penurunan tingkat kemiskinan dapat terbatas. Selain itu, ada faktor lain, salah satunya adalah pola pengeluaran yang tidak tepat. Jika alokasi dana desa tidak digunakan untuk kebutuhan mendesak atau tidak sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat, maka dampak positifnya terhadap kemiskinan mungkin terbatas.

Berdasarkan analisis diatas hasil penelitian dalam penelitian Darmis dan Kartina (2020), Magal (2021), Dewi dan Irama (2018) dengan mengkaji peran alokasi keuangan wilayah pada kemiskinan, menegaskan yakni alokasi keuangan wilayah memiliki peran dalam kemiskinan wilayah. Peningkatan alokasi keuangan wilayah mungkin tidak selalu secara langsung mengurangi tingkat kemiskinan. Faktor lain seperti pengelolaan dana, program pembangunan yang efektif, dan dampak kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi hasil tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Merujuk pada data kajian hasil serta pengetesan hasil riset yang sudah dilaksanakan, jadi bisa disimpulkan yakni diantaranya:

1. Berdasarkan parsial data keseluruhan keuangan wilayah memiliki peran yang meningkat pada level kemiskinan di Kabupaten Bogor tahun 2022. Hal ini diartikan keuangan wilayah belum relevan dan tidak berhasil untuk menimalisir kemiskinan, diakibatkan dalam penggunaan keuangan wilayah hampir keseluruhan dipakai untuk pembangunan infrastruktur atau fasilitas fisik pedesaan.
2. Berdasarkan parsial data keseluruhan keuangan wilayah memiliki peran yang meningkat pada level kemiskinan di Kabupaten Bogor tahun 2022. Sehingga semakin tinggi pemberian dana wilayah jadi level kemiskinan juga semakin tinggi, dikarenakan Peningkatan alokasi dana desa mungkin tidak selalu secara langsung mengurangi tingkat kemiskinan

Saran

Berikut ini berupa masukan-masukan yang bisa dituliskan peneliti melalui riset ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah ataupun instansi terkait tetap memastikan bahwa dana desa siap untuk masa depan, pemerintah harus tetap meningkatkan kapasitas SDM mereka dan melaksanakan pengarahannya, pembelajaran, maupun pengontrolan yang cenderung tersusun serta relevan. Disamping itu, kerjasama, relasi, maupun motivasi dibutuhkan dalam pengimplementasian aktivitas maupun program untuk lebih mengutamakan pembangunan desa mulai dari pimpinan nasional, kabupaten, kecamatan, dan daerah.
2. Untuk lembaga pendidikan ataupun akademis butuh diimplementasikan riset berikutnya supaya melaksanakannya penyempurnaan pada penelitian ini yaitu, dengan meneliti dan memperdalam

karakter dari para petinggi atau aparatur daerah dengan kuisioner atau jumlah sampel data terkait latar belakang yang nantinya dikaji. Serta menambah masa pelaksanaan riset supaya data yang diperoleh detail serta beragam. Diekspektasikan pula bisa memperdalam riset terkait seberapa jauh pengaruh terhadap elemen kebijakan dan alokasi dana desa terhadap pengurangan kemiskinan.

3. Para warga diekspektasikan supaya senantiasa mengontrol arah kegiatan pimpinan wilayah maupun dibutuhkan strategi pengendalian melalui warga supaya mengontrol pemakaian alokasi keuangan wilayah yang dimaksud supaya dana tersebut dipakai berdasarkan pada tujuannya dalam menambah kesejahteraan penduduk.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan memperluas sampel ke sektor pemerintah lainnya dan juga memperdalam mengenai keterbukaan maupun penghitungan pemakaian dana desa serta alokasi dana desa yang dijalankan pada petinggi ataupun aparatur pemerintah daerah, serta mempergunakan rentang waktu pengambilan sampel yang lebih panjang. Diharapkan juga dapat menambah unsur dari dalam maupun dari luar lain yang bisa memberikan peran dalam level kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, Jumlah Keluarga Miskin Kab Bogor 2023 (*On-line*) tersedia di: www.bps.go.id. (30 nov 2023), Pukul 01.07 WIB
- Chasbiandani, T., Rafrini Amyulianthy, & Anisa May. (2022). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DBH, DAU, DAK TERHADAP BELANJA MODAL. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Pancasila (JIAP)*, 2(1), 1-18. <https://doi.org/10.35814/jiap.v2i1.2555>
- Darma, B. (2021). *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R2)*. Guepedia.
- Dewi, R. S., & Irama, O. N. (2018). Pengaruh pendapatan desa dan alokasi dana desa terhadap belanja desa dan kemiskinan. *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 5(2).
- Fadilla, A., Sinurat, G., & Jayadin, J. (2023). Analisis Tata Kelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, dan Pengaruhnya Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bogor. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 23(1), 76-84.
- Fitri, A., & Anwar, K. (2020). Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Gampong Terhadap Kemiskinan Di Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 3(1), 11. <https://doi.org/10.29103/jeru.v3i1.3197>
- Hartatik, H., Kwintiana, B., Nengsih, T. A., Baradja, A., Harto, B., Sudipa, I. G. I., ... & Gugat, R. M. D. (2023). *DATA SCIENCE FOR BUSINESS: Pengantar & Penerapan Berbagai Sektor*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Magal, P., Kawung, G. M., B Maramis, M. T., & Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, J. (2021). Village Fund Allocation Analysis on Poverty and Community Welfare in Solimandungan Baru Village District Bolaang Mongondow District. *Jurnal EMBA*, 9(1), 462–

469.

Nurkhamid, M. (2023). Perspektif Public Choice Theory Pada Pakaian Bekas Impor Di Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Keuangan Negara. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 3173-3186.

Peraturan bupati bogor tahun 2022 mengenai Dana desa Peraturan bupati bogor Atahun 2022 mengenai alokasi dana desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Desa, Pasal 96 Ayat (1).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa. Badan Pusat Statistik, Indikator Kemiskinan,(On-line) tersedia di: www.bps.go.id. (30 nov 2023), Pukul 01:07 WIB

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa, Pasal 100 Ayat (1).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. *Jurnal ekonomi & kebijakan publik*, 6(1), 61-76.

Rimawan, M., & Aryani, F. (2019). Pengaruh alokasi dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia serta kemiskinan di Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(3), 287-295.

Sari, I. M., & Abdullah, M. F. (2017). Analisis ekonomi kebijakan dana desa terhadap kemiskinan desa di kabupaten tulungagung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), 34-49.

Sasaran dan tujuan Dana Desa (On-line), tersedia di www.djpk.kemekeu.go.id (29 nov 2023) pukul 23.00 WIB Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa, Pasal 99 Ayat (1). Ayat 2

Shinta Budi Astuti, Sarah Frantiska Santoso, & Sofyan Bantasyam. (2021). PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS(DAK), DAN DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Pancasila (JIAP)*, 1(2), 94-105. <https://doi.org/10.35814/jiap.v1i2.2455>

Sigit, T. A., & Kosasih, A. (2020). Pengaruh dana desa terhadap kemiskinan: studi tingkat kabupaten/kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 105-119.